

PENGARUH UTANG LUAR NEGERI TERHADAP EKONOMI POLITIK NEGARA INDONESIA

Geraldine Dwitiya Putri Kirana¹, Yulhendri², Lince Magriasti³

^{1,3} Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar, Kota Padang, Sumatera Barat, ²Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar, Kota Padang, Sumatera Barat,

Email: geraldinegeral20@gmail.com

Abstract

The initial aim of this research is to describe how Indonesia's foreign debt has developed, how it affects Indonesia's political economy, and what alternative policies can be used to reduce the detrimental impact on the country's economy. The research method used is literature and qualitative studies. Literature research to produce quality data. Several government institutions, including Bank Indonesia, Central Statistics Agency, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, provided research data. The research results show that: 1) Foreign Debt (ULN) can accelerate Indonesia's economic growth in industries that use a lot of debt. 2) The government can utilize foreign debt for its interests in the political field, especially in terms of conducting campaigns. 3. The importance of domestic savings is expanding. 3) A third option to address significant foreign debt is an exchange program.

Keywords: Influence, Foreign Debt, Political Economy, Indonesia.

Abstrak

Tujuan awal dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan utang luar negeri Indonesia, bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi politik Indonesia, dan alternatif kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak yang merugikan perekonomian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan kualitatif. Penelitian literatur untuk menghasilkan data yang berkualitas. Beberapa lembaga pemerintah, antara lain Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menyediakan data penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Utang Luar Negeri (ULN) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada industri yang banyak menggunakan utang. 2) Pemerintah dapat memanfaatkan utang luar negeri untuk kepentingannya di bidang politik, terutama dalam hal pelaksanaan kampanye. 3. Pentingnya tabungan domestic semakin meluas. 3) Opsi ketiga untuk mengatasi utang luar negeri yang signifikan adalah program pertukaran.

Kata Kunci: Pengaruh, Utang Luar Negeri, Ekonomi Politik, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi yang menghasilkan output, yang diukur dengan menggunakan PDB. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang ingin mencoba untuk dapat

membangun bangsa dan negaranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari negara lain. Tentu hal ini pernah dicoba namun ternyata Indonesia sulit untuk terus bertahan ditengah derasnya arus globalisasi yang terus berkembang cepat. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia akhirnya terpaksa harus mengikuti arus tersebut, yaitu mencoba membuka diri dengan menjalin kerja sama dengan negara lain demi terlaksananya pembangunan nasional terutama dari sendi ekonomi nasional (Nasir, et, 2023).

Utang luar negeri merupakan sebagian dari total utang suatu negara yang

diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan ataupun perorangan. Utang pada dasarnya merupakan suatu alternatif yang dilakukan karena berbagai alasan yang rasional. Dalam alasan-alasan yang rasional itu ada muatan urgensi dan ada pula muatan ekspansi. Muatan urgensi disini ialah utang dipilih mungkin sebagai sumber pembiayaan karena keperluan mendesak dimana terdapat kebutuhan yang harus diselesaikan. Sedangkan muatan ekspansi sendiri berarti utang dianggap sebagai alternatif pembiayaan yang dianggap dapat memberikan keuntungan. Dalam Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/7/PBI/2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank, dinyatakan bahwa pinjaman luar negeri merupakan salah satu faktor penting yang dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap neraca pembayaran, kestabilan moneter dan kesinambungan pembangunan. Selain itu, menurut Undang-Undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 ayat 3 batas maksimal rasio utang luar negeri terhadap PDB adalah 60% sehingga untuk mengurangi pengaruh negatif terhadap neraca pembayaran, kestabilan moneter dan kesinambungan pembangunan, maka pinjaman luar negeri tersebut perlu dikelola dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan perekonomian nasional serta menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional (A. Setiawan et al., 2022).

Posisi terakhir Utang Luar Negeri (ULN) menjadi perhatian. Beberapa negara berkembang termasuk Indonesia pernah mengalami masalah ekonomi karena tingginya utang luar negeri (Simanungkalit, 2020). Trauma berat akan krisis ekonomi Indonesia 20 tahun yang lalu (1998) menjadi latar belakang kritik tentang posisi utang luar negeri. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian penting peningkatan kesejahteraan sosial. Utang merupakan salah satu solusi bagi negara

ketika sumber-sumber penerimaan keuangan negara masih jauh dari layak (Basten, E. Van, Hudayah, S., & Gani, 2021).

Indonesia sebenarnya pernah memiliki suatu kondisi perekonomian yang cukup menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1986 sampai tahun 1989 terus mengalami peningkatan, yakni masing-masing 5.9% di tahun 1986, kemudian 6.9% di tahun 1988 dan menjadi 7.5% di tahun 1989. Namun pada tahun 1990 dan 1991 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatat angka sebesar 7.0%, kemudian tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, masing-masing tingkat pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 6.2%, 5.8%, 7.2%, 6.8%, dan 5.8%. Angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah seiring dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan kesempatan kerja yang terus meningkat, dan sebagainya. Namun pada satu titik tertentu, perekonomian Indonesia akhirnya runtuh oleh krisis ekonomi yang melanda secara global pada tahun 1997-1998 yang ditandai dengan inflasi yang meningkat tajam, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, tingginya angka pengangguran seiring dengan menurunnya kesempatan kerja, dan ditambah lagi semakin besarnya jumlah utang luar negeri Indonesia akibat kurs rupiah yang semakin melemah. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya dukungan mikro yang kuat, semakin meningkatnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sumber daya manusia yang kurang kompetitif, dan sebagainya (Zaskya Humairah, 2023).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan kualitatif. Penelitian literatur untuk menghasilkan data yang berkualitas berdasarkan sumber data dan informasi yang disediakan oleh pemerintah dan berdasarkan pengalaman dalam berbagai publikasi seperti buku,

majalah, artikel, surat kabar, dan konten online yang didistribusikan di Internet. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Heny & Nurdin, 2022). Ini digunakan untuk melihat Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Ekonomi Politik Negara Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 403,9 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan IV 2023 yang sebesar 408,5 miliar dolar AS. Penurunan posisi ULN ini bersumber dari ULN sektor publik maupun swasta. Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% (yoy), setelah tumbuh 3,0% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Posisi ULN pemerintah pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 192,2 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 196,6 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN pemerintah terkontraksi sebesar 0,9% (yoy), setelah tumbuh 5,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek *timing*, tenor, *currency*, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling

efisien dan optimal. Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas pemerintah yang utamanya mencakup sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,1% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,3%); Jasa Pendidikan (16,9%); Konstruksi (13,7%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6%). Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.

Posisi ULN swasta pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 198,4 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,8% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan lalu sebesar 1,2% (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan bukan lembaga keuangan (*nonfinancial corporations*) dan lembaga keuangan (*financial corporations*) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 1,8% (yoy) dan 1,6% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.

Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3% dari 29,8% pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian (Departemen Komunikasi, 2024).

Tabel 1. Posisi Utang Luar Negeri Menurut Kelompok Pemijam (juta USD)

Kelompok Pemijam	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Pemerintah dan Bank Sentral</i>						
Pemerintah	137.396	154.875	177.318	183.197	199.876	206.375
Bank Sentral	5.212	3.408	3.304	3.078	2.996	2.871
<i>Swasta</i>						
Lembaga Keuangan	42.997	40.062	40.563	44.953	46.636	43.227
Bukan Lembaga Keuangan	125.125	121.661	131.284	144.202	154.054	164.462
Total	310.730	320.006	352.469	375.430	403.563	416.935

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Agustus (2020)

Indonesia sudah lama mengenal utang luar negeri, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Warisan utang sudah ada dari peninggalan pemerintah kolonial belanda. Peningkatan utang luar negeri dari tahun ketahun bertambah. Mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Pada awal tahun 2023 utang indonesia mencapai 404,6 miliar dolar AS, pada akhir febuari 2023 utang indonesia turun menjadi 400,1 miliar dolar AS (Bank Indonesia, 2023).

Utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Lincoln Arsyad, 2010). Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut.

Indonesia sudah lama mengenal utang luar negeri, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Warisan utang sudah ada dari peninggalan pemerintah kolonial

belanda. Peningkatan utang luar negeri dari tahun ketahun bertambah. Mulai dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Orde Reformasi. Pada awal tahun 2023 utang indonesia mencapai 404,6 miliar dolar AS, pada akhir febuari 2023 utang indonesia turun menjadi 400,1 miliar dolar AS (Bank Indonesia, 2023). Utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi (Lincoln Arsyad, 2010). Utang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut.

Tujuan utama utang luar negeri di Indonesia di gunakan sebagai belajar pembangunan atau untuk membiayai pembangunan di semua wilayah yang ada di Indonesia. Yang di harapkan yaitu ikut membiayai proyek pembagunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terindikasi dengan naiknya PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang dapat berkontribusi menurunkan angka kemiskinan. Namun dalam praktiknya utang luar negeri tidak semuanya dibelanjakan untuk kepentingan pembangunan. Sebagian utang digunakan untuk membayar utang sebelumnya baik berupa utang pokok maupun bunganya. Semakin banyak utang luar negeri yang diambil makan semakin banyak pula akumulasi utang luar negerinya (hernatasa, 2004).

Kondisi ini tidak menguntungkan bagi indonesia karena sebagian besar dana anggara pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diharapkan dapat memajukan perekonomian di Indonesia. Dana yang dikeluarkan malah tersedot untuk pengeluaran rutin yang mana membayar cicilan utang luar negeri dan bunganya. Utang luar negeri yang tujuan awalnya untuk menunjang pembangunan di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi, mengakibatkan menjadi beban pemerintah saat melakukan pembayaran utang tersebut.

Pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan sangat berdampak negatif. Sehingga dapat menghilangkan kontribusi positif dari utang luar negeri tersebut. Utang luar negeri seharusnya memberi pengaruh positif terhadap suatu negara yaitu dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara seperti dengan cara meningkatkan produksi (PDB), memperluas kesempatan kerja dan memperbaiki neraca pembayaran. Namun jika utang digunakan secara tidak wajar maka kemungkinan utang tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara bahkan dapat mengancam kestabilan makroekonomi negara. Dalam masalah utang luar negeri ini tata kelola utang yang dilakukan oleh pemerintah juga harus di pertimbangkan.

Pada era Soekarno, utang di kelola secara hati-hati yaitu digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan biaya pembangunan yang tidak bisa ditutup oleh pendanaan dalam negeri. Pada era Soeharto, utang luar negeri semuanya digunakan untuk belanja pembangunan, dimana harus melalui prosedur dan pengelolaan yang ketat. Pada era SBY utang luar negeri dikelola dengan anggaran berbasis kinerja. Pada era Jokowi, utang luar negeri selain untuk defisit anggaran juga digunakan untuk menutup cicilan utang pokok dan bunganya. Hal ini menyebabkan perbedaan era Jokowi dengan era presiden-presiden yang lainnya. Dana hasil utang yang di gunakan untuk infrastruktur tidak berdampak langsung terhadap perekonomian nasional, alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan dalam negeri, sebagian proyek yang dilakukan pemerintah banyak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak nya media melansir derasnya alur masuk tenaga kerja asal Cina masuk ke Indonesia. Maka, hal ini menyebabkan utang luar negeri terhadap pembangunan tidak berdampak terhadap penurunan kemiskinan di

Indonesia. Tingginya level utang dapat menyebabkan berkurangnya sumberdaya yang dapat dialokasikan untuk kepentingan investasi yang dapat memperbaiki kinerja ekspor. Menurut Pattilo utang luar negeri berdampak kurang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. Namun utang yang besar bukan menunjukkan negara telah barada dalam kebangkrutan ekonomi. Sebaliknya pihak pemerintah juga tidak dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat membawa pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan dalam waktu singkat. Utang luar negeri memiliki korelasi dengan kondisi perekonomian di indonesia dan juga terhadap tingkat kemiskinan. Nilai produksi domestik bruto cenderung meningkat dan menurunkan angka kemiskinan. Meskipun secara nasional utang luar negeri dapat meningkatkan PDB dan menurunkan kemiskinan, utang luar negeri tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. bahkan utang luar negeri cenderung menurunkan kesejahteraan rakyat(Nurlaili, 2023).

Utang luar negeri Indonesia telah digunakan untuk membangun infrastruktur sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014. Saat Jokowi berkuasa pada tahun 2014, ia mewarisi utang sebesar US\$122 miliar dari pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah empat tahun, utang meningkat 48 persen menjadi US\$181 miliar. Kenaikan tersebut signifikan, mengingat utang naik 26 persen di bawah lima tahun pemerintahan SBY dari 2009 hingga 2013. Sementara itu, rasio utang terhadap D tumbuh dari 24,7 persen menjadi 30 persen antara 2014 dan 2018. Namun, jumlah ini lebih rendah dari batas 60 persen pengelolaan utang di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa utang luar negeri ini untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pasar keuangan, menjaga momentum, menghindari hilangnya kesempatan, dan memberikan warisan aset bagi generasi mendatang.

Pemerintah Indonesia menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur, yang menjadi tujuan utama pemerintahan Jokowi. Dana besar-besaran telah diarahkan ke proyek-proyek skala besar seperti bandara, pelabuhan laut, sistem mass rapid transit, jalan tol, dan pembangkit listrik tenaga panas dan air. Belanja infrastruktur terus meningkat sekitar US\$10 miliar per tahun di bawah rencana anggaran Jokowi, hampir empat kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Jokowi juga memprioritaskan belanja di dua sektor ekonomi penting lainnya: pendidikan dan kesehatan. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat posisi ULN Indonesia pada akhir Juli sebesar USD 400,4 miliar. Jumlah ini turun dari bulan sebelumnya yang sebesar USD 403,6 miliar. Tren penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan utang luar negeri di sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2022 turun menjadi USD 185,6 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi Juni sebesar USD 187,3 miliar. Sedangkan ULN sektor swasta pada Juli 2022 tercatat sebesar USD 206,3 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD 207,7 miliar.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022, saat ini setidaknya ada 21 negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Untuk memahami hubungan utang luar negeri Indonesia dengan hubungan luar negeri Indonesia dapat dilihat dari data yang tersedia mengenai negara-negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Setidaknya delapan negara telah memberikan pinjaman kepada Indonesia per Juli 2022. 1) Singapura USD 60.076 miliar 2) Amerika Serikat USD 33.527 miliar 3) Jepang USD 25.485 miliar 4) China USD 20.839 miliar 5) Hong Kong USD 17.634 miliar 6) Korea Selatan USD

6.408 miliar 7) Jerman USD 5.476 miliar, 8) Belanda USD 5.210 miliar. Dengan utang luar negeri Indonesia ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, Indonesia beradaptasi dalam pelaksanaan hubungan luar negerinya.

Adaptasi ini lebih merupakan kebijakan fleksibel yang tidak menekankan kekakuan yang terlihat, misalnya dalam hubungan Indonesia dengan China. Dampak pertama utang luar negeri terhadap politik luar negeri secara umum adalah hubungan Indonesia dengan negara-negara pemberi pinjaman kepada Indonesia berjalan positif. Pemerintah Indonesia dalam hubungan politik dengan negara-negara tersebut dalam keadaan teratur dan baik. Artinya, baik Indonesia maupun negara mitra memiliki kepentingan politik yang stabil. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sengketa politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan hubungan politik seperti itu, beban utang Indonesia yang besar berada dalam kondisi yang dapat dibayar secara bertahap tanpa harus mengganggu hubungan diplomatik. Artinya, setidaknya delapan negara yang meminjamkan uangnya tidak merasa terganggu dengan kinerja ekonomi dan politik Indonesia. Dengan pemerintahan yang stabil dari tahun 2014 hingga 2022, besaran utang dapat dipahami oleh negara mitra sebagai upaya membangun perekonomian. Indonesia juga dinilai mampu mengembalikan utang sesuai jadwal. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Jokowi ditandai dengan beberapa kerjasama di bidang ekonomi bahkan pendidikan. Walaupun Indonesia terkena dampak dari Perang Dagang antara China dan Amerika Serikat, namun karena dampaknya yang terukur Indonesia tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat (Kristiadi, 2021).

Pergantian pemerintahan dari Barack Obama, Donald Trump ke Joe Biden, dan hubungan bilateral kedua negara bisa dikatakan kurang campur tangan. Hal ini antara lain karena Washington masih

menempatkan Indonesia pada posisi strategis di Asia. Kemitraan Komprehensif telah memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia ini (Yerichielli, 2019). Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura stabil dan berkembang. Indonesia dan Singapura baru-baru ini menandatangani perjanjian pengelolaan wilayah udara (Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Adhayanto, 2022). Demikian pula, Singapura menerima perjanjian ekstradisi bagi pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke negara tersebut (Desker, 2022). Hubungan Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan juga tumbuh karena hubungan perdagangan yang tinggi. Indonesia membuka pasar produk Jepang dan Korea Selatan mulai dari produk elektronik hingga otomotif (Verico, K., & Riefky, 2022).

Menurut Sari (2021), Indonesia dan Korea Selatan melanjutkan kerja sama di bidang pertahanan. Secara kuantitatif, volume perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan dan Jepang masih tinggi (Rifki, 2021). Utang Indonesia yang sangat besar kepada kedua negara dapat dikatakan tidak mengganggu hubungan ekonomi dan politik kedua belah pihak. Kedua, jika politik luar negeri Indonesia yang pertama menunjukkan kedekatan bahkan hubungan positif dengan negara-negara kreditor dan lembaga bantuan, sikap Indonesia menghindari konfrontasi merupakan dampak kedua. Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan negara kredit relatif stabil. Hampir dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2014 hingga 2022 tidak ada konflik yang mengharuskan Indonesia berhadapan langsung dengan negara-negara tersebut. Hubungan diplomasi yang langgeng ini telah memberikan banyak peluang bagi Indonesia untuk fokus membangun pemerintahannya sehingga dapat melunasi utang hasil produktivitas antara lain karena pembangunan infrastruktur. Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir telah menjalankan kebijakan

luar negeri dengan tidak membesar-besarkan masalah negara pemberi kredit. Misalnya, Indonesia dan China masih memiliki masalah perbatasan di Laut Natuna Utara. Indonesia mengklaim bahwa 200 mil laut pulaunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif (Darmayadi, A., & Purnamasari, 2022). China mengkritisi kebijakan Indonesia tersebut, namun Indonesia tidak memberikan penegasan yang kuat dengan alasan antara lain menghindari konfrontasi di Laut China Selatan karena mempertahankan hubungan ekonomi yang membaik (A. and A. N. Z. Setiawan, 2019).

Begitu juga Indonesia masih memiliki masalah perbatasan dengan Singapura. Dengan Amerika Serikat Indonesia mengalami dampak yang berat ketika AS dan China terlibat dalam perang dagang. Namun, Indonesia berusaha agar isu perdagangan luar negeri dengan Amerika Serikat tidak meluas menjadi isu hubungan bilateral. Dampak ketiga adalah berkurangnya daya kritis Indonesia dalam menghadapi kreditor. Kebijakan luar negeri yang semula bebas dan aktif dalam mencapai kepentingan Indonesia mulai terbebani utang meski diklaim Indonesia dalam posisi sehat secara ekonomi. Di sini dicatat bahwa dengan beban utang yang tinggi meskipun pemerintah mengklaimnya sebagai sesuatu yang wajar, ketergantungan Indonesia semakin besar pada negara-negara yang memberi bantuan. Akibatnya, hubungan luar negeri Indonesia tidak lagi kritis dalam hal-hal yang membutuhkan sikap mandiri, bebas, dan aktif dalam menciptakan perdamaian. Dalam kasus serangan Rusia ke Ukraina yang dibalas dengan bantuan militer Barat ke Ukraina di bawah pimpinan Amerika Serikat, Indonesia tidak secara tegas menyatakan sikap mengkritik langkah Barat mempersenjatai Ukraina. Indonesia tampaknya mengikuti wacana pro-Rusia tetapi tidak sampai mengkritik Barat. Indonesia melakukan diplomasi perdamaian ke Ukraina dan Rusia dalam kapasitasnya sebagai ketua KTT G-20 di

Bali (Nugraha, Ogi Nanda Raka Ade Candra & Erwan Syah, Danang Prasetyo, 2022). Namun, diplomasi perdamaian tampaknya tidak berdampak kuat karena keterbatasan kapasitas Indonesia sebagai juru damai. Kapasitas Indonesia belum sepenuhnya kuat; namun, ketergantungan pada kreditor yang terlibat langsung dalam perang tidak memberikan daya dukung bagi tindakan Indonesia. Dampak utang luar negeri terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya utang luar negeri Indonesia ke China. Terlepas dari implikasi ekonominya, ketergantungan Indonesia yang semakin besar pada China memiliki dampak politik yang mendalam. Karena Indonesia semakin bergantung pada China, melawan agresivitas China yang semakin meningkat di Laut China Selatan menjadi lebih sulit. Dilaporkan bahwa kapal-kapal penangkap ikan China sering melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia di Laut China Selatan. Tetapi hubungan Indonesia dengan Cina telah mencegah Jakarta untuk bertindak aktif di Laut Cina Selatan kecuali siap kehilangan mitra dagang terbesarnya dan salah satu investor terbesarnya (Rakhmat, 2020).

Selain dari pihak Indonesia, terdapat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, dari pihak pemberi pinjaman, beberapa tuntutan mungkin muncul. Dengan Amerika Serikat mengingat utangnya mencapai USD 33 miliar, Washington dimungkinkan mendikte kerja sama, misalnya dalam penyediaan vaksin COVID-19. Lebih lanjut, Hakim berargumen bahwa China bisa saja mendikte kerjasama dalam proyek infrastruktur seperti pada proyek perkeretaapian lainnya. Sedangkan dengan Singapura, Indonesia juga dapat bersandar ke Singapura dalam kerjasama di bidang-bidang strategis Indonesia seperti Batam dan banyak kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dengan negara dan organisasi pemberi pinjaman asing. Namun, meski utang Indonesia sudah sekitar Rp 7000 triliun dan dibayar melalui cicilan dan

alokasi APBN yang ada, hingga saat ini mungkin belum ada tekanan yang berarti dari pihak luar. Artinya, Indonesia masih bisa bernegosiasi untuk mengalihkan sumber pendanaan lain jika dianggap sebagai sumber pendanaan yang saat ini dianggap mencampuri urusan dalam negeri. Sejauh ini Indonesia belum pernah mendengar besarnya tekanan dari IMF karena Jakarta bisa saja pindah ke sumber lain. Ciri-ciri politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan sikap tegas di dunia internasional sedikit tereduksi untuk tidak dikategorikan memudar. Hal ini juga secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan fokus pembangunan Indonesia di negara dengan beban utang yang besar kepada negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Dalam beberapa penelitian, ketergantungan terhadap pihak asing dapat menyebabkan tidak lagi leluasa menjalankan kebijakan luar negerinya. Meski tidak ada larangan tertulis, namun sebagai negara dengan utang besar, ia tidak bisa lagi bebas memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara tegas. Namun Mulyana (2022) berpendapat bahwa sejak awal Indonesia menjamin bahwa penyaluran utang luar negeri tidak boleh berdampak langsung terhadap praktik pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia selama puluhan tahun menganut dan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, politik luar negeri aktif dan bebas telah dianut berdasarkan landasan konstitusional yaitu UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada gugus kalimat. Politik luar negeri yang tidak terikat dengan kekuatan asing dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk bermanuver politik luar negeri karena tidak ada rasa ketergantungan (*Conversation.Com*, 2020).

Indonesia berutang kepada banyak negara, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan Singapura. Indonesia juga

berutang kepada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Dan di dunia di mana Rusia terlibat dalam konflik di Ukraina, China dan AS terlibat dalam konflik di Laut China Selatan, dan AS, Rusia, dan China semuanya terlibat dalam konflik di Timur Tengah, Indonesia perlu

memperhatikan dengan bobot hutang luar negerinya sebelum melakukan politik luar negeri (*Okezone.Com, 2022*).

Berikut adalah hasil Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Ekonomi Politik Negara Indonesia

-
- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia | <ul style="list-style-type: none">• Posisi ULN Indonesia pada triwulan I 2024 tercatat sebesar 403,9 miliar dolar AS, turun dari 408,5 miliar dolar AS pada triwulan IV 2023.• ULN tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,02% (yoy), setelah sebelumnya tumbuh 3,0% (yoy).• ULN pemerintah turun menjadi 192,2 miliar dolar AS dari 196,6 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya.• Secara tahunan, ULN pemerintah berkontraksi sebesar 0,9% (yoy), setelah tumbuh 5,4% (yoy) pada triwulan sebelumnya.• Penurunan ini terutama disebabkan oleh perpindahan dana investor nonresiden dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain.• Pemerintah berkomitmen untuk mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas.• ULN swasta tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, turun dari 198,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya.• ULN swasta mengalami kontraksi tahunan sebesar 1,8% (yoy), lebih dalam dari kontraksi 1,2% (yoy) pada triwulan sebelumnya.• Kontraksi ini terjadi pada perusahaan bukan lembaga keuangan dan lembaga keuangan.• Sektor ekonomi terbesar dalam ULN swasta adalah Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin, serta Pertambangan dan Penggalian.• Rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,3% dari 29,8% pada triwulan sebelumnya.• ULN didominasi oleh utang jangka panjang, mencapai 86,8% dari total ULN.• Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. |
| 2 | Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) Terhadap Perekonomian Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Statistik Terkini:<ul style="list-style-type: none">• Pada awal 2023, utang luar negeri Indonesia mencapai 404,6 miliar USD, turun menjadi 400,1 miliar USD pada akhir Februari 2023 (Bank Indonesia, 2023).2. Tujuan dan Manfaat Utang:<ul style="list-style-type: none">• Utang luar negeri digunakan sebagai sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan untuk mendukung kegiatan ekonomi, terutama proyek-proyek produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi.• Untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan, yang diharapkan mengurangi kemiskinan. |
-

3 Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) terhadap Politik Indonesia

3. Penggunaan Utang yang Tidak Optimal:
 - Sebagian utang digunakan untuk membayar utang sebelumnya, baik pokok maupun bunganya.
 - Membayar cicilan utang menjadi beban besar bagi APBN, yang mengurangi dana untuk pembangunan ekonomi.
 - Proyek infrastruktur sering mempekerjakan tenaga kerja asing, yang tidak langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
 4. Dampak Ekonomi:
 - Walaupun utang luar negeri bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, penggunaannya yang tidak efisien dapat berdampak negatif pada perekonomian dan kestabilan makroekonomi.
 - Pattilo menyatakan bahwa dampak utang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang signifikan. Utang yang besar tidak selalu menunjukkan kebangkrutan ekonomi, namun pengelolaan yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam jangka panjang.
 5. Kondisi Sosial-Ekonomi:
 - Meskipun utang luar negeri dapat meningkatkan PDB dan mengurangi kemiskinan secara nasional, dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat masih kurang signifikan.
 - Pengelolaan utang yang kurang optimal dapat mengurangi sumber daya untuk investasi yang memperbaiki kinerja ekspor dan kesejahteraan masyarakat.
 1. Peningkatan Utang di Era Jokowi:
 - Saat Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014, ia mewarisi utang sebesar USD 122 miliar dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
 - Pada 2018, utang meningkat 48% menjadi USD 181 miliar, dengan rasio utang terhadap PDB meningkat dari 24,7% menjadi 30%.
 2. Tujuan dan Penggunaan Utang:
 - Pemerintah menyatakan utang luar negeri digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pasar keuangan, dan membangun infrastruktur.
 - Proyek-proyek besar seperti bandara, pelabuhan, sistem MRT, jalan tol, dan pembangkit listrik menjadi fokus utama.
 3. Sumber Utang dan Hubungan Luar Negeri:
 - Pada Juli 2022, utang luar negeri Indonesia mencapai USD 400,4 miliar, turun dari USD 403,6 miliar pada bulan sebelumnya.
 - Utang luar negeri berasal dari 21 negara, dengan Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan China sebagai kreditor utama.
 - Hubungan diplomatik dengan negara-negara kreditor tetap stabil dan positif, memfasilitasi pembayaran utang secara bertahap tanpa gangguan diplomatik.
 4. Hubungan Diplomatik:
 - Indonesia menjaga hubungan baik dengan kreditor utama seperti Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.
-

-
- Perjanjian bilateral dan kerja sama di berbagai bidang ekonomi, pendidikan, dan pertahanan telah memperkuat hubungan diplomatik.
 - Hubungan stabil ini membantu Indonesia dalam menjaga kestabilan politik dan ekonomi.
5. Tantangan dan Pengaruh Politik:
- Utang luar negeri mempengaruhi sikap politik luar negeri Indonesia, membuatnya lebih cenderung menghindari konfrontasi dengan negara kreditor.
 - Ketergantungan pada China membuat Indonesia berhati-hati dalam menghadapi isu Laut China Selatan.
 - Meskipun utang Indonesia besar, belum ada tekanan signifikan dari negara kreditor yang mengganggu kebijakan luar negeri Indonesia.
6. Kritik dan Kebijakan Luar Negeri:
- Indonesia tetap menjaga politik luar negeri yang bebas dan aktif, meskipun ada kekhawatiran bahwa utang besar dapat mengurangi daya kritis dalam kebijakan luar negeri.
 - Indonesia berusaha tidak terlibat dalam konflik besar dan fokus pada pembangunan ekonomi.
 - Diplomasi Indonesia terkait konflik global seperti perang Rusia-Ukraina lebih mengedepankan pendekatan damai dan menghindari sikap kritis yang keras terhadap salah satu pihak.
-

Pada triwulan I 2024, posisi ULN Indonesia mencapai 403,9 miliar dolar AS, turun dari 408,5 miliar dolar AS pada triwulan IV 2023. Penurunan ini mencerminkan kontraksi tahunan sebesar 0,02% (yoy). ULN pemerintah turun menjadi 192,2 miliar dolar AS dan mengalami kontraksi tahunan sebesar 0,9% (yoy), terutama disebabkan oleh perpindahan dana investor dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN dengan fleksibel untuk mendukung sektor produktif dan prioritas belanja. ULN swasta juga menurun menjadi 197,0 miliar dolar AS dengan kontraksi tahunan 1,8% (yoy), dipengaruhi oleh sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, dan lainnya. Rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,3%, dengan dominasi utang jangka panjang sebesar 86,8%. Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan ULN.

Utang luar negeri Indonesia digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah dan

proyek-proyek produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur. Namun, penggunaan utang yang tidak optimal, seperti untuk membayar utang sebelumnya, membebani APBN dan mengurangi dana pembangunan. Meskipun utang luar negeri bertujuan untuk meningkatkan PDB dan mengurangi kemiskinan, dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat kurang signifikan. Pengelolaan utang yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Di era Presiden Joko Widodo, utang luar negeri meningkat signifikan, digunakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Utang berasal dari berbagai negara seperti Singapura, AS, Jepang, dan China, dengan hubungan diplomatik yang stabil dan positif. Ketergantungan pada kreditor utama membuat Indonesia lebih berhati-hati dalam kebijakan luar negeri, terutama terkait isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan. Meskipun ada kekhawatiran bahwa utang besar dapat mengurangi daya kritis dalam kebijakan luar negeri,

Indonesia tetap menjaga politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fokus pada pembangunan ekonomi.

KESIMPULAN

Pada triwulan I 2024, posisi ULN Indonesia mencapai 403,9 miliar dolar AS, turun dari 408,5 miliar dolar AS pada triwulan IV 2023. Penurunan ini mencerminkan kontraksi tahunan sebesar 0,02% (yoy). ULN pemerintah turun menjadi 192,2 miliar dolar AS dan mengalami kontraksi tahunan sebesar 0,9% (yoy), terutama disebabkan oleh perpindahan dana investor dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN dengan fleksibel untuk mendukung sektor produktif dan prioritas belanja. ULN swasta juga menurun menjadi 197,0 miliar dolar AS dengan kontraksi tahunan 1,8% (yoy), dipengaruhi oleh sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan, dan lainnya. Rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,3%, dengan dominasi utang jangka panjang sebesar 86,8%. Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pengelolaan ULN.

Utang luar negeri Indonesia digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah dan proyek-proyek produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur. Namun, penggunaan utang yang tidak optimal, seperti untuk membayar utang sebelumnya, membebani APBN dan mengurangi dana pembangunan. Meskipun utang luar negeri bertujuan untuk meningkatkan PDB dan mengurangi kemiskinan, dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat kurang signifikan. Pengelolaan utang yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Di era Presiden Joko Widodo, utang luar negeri meningkat signifikan, digunakan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Utang berasal dari berbagai negara seperti Singapura, AS, Jepang, dan China, dengan hubungan diplomatik yang stabil dan

positif. Ketergantungan pada kreditor utama membuat Indonesia lebih berhati-hati dalam kebijakan luar negeri, terutama terkait isu-isu sensitif seperti Laut China Selatan. Meskipun ada kekhawatiran bahwa utang besar dapat mengurangi daya kritis dalam kebijakan luar negeri, Indonesia tetap menjaga politik luar negeri yang bebas dan aktif serta fokus pada pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basten, E. Van, Hudayah, S., & Gani, I. (2021). Pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada pengangguran terbuka di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 1, 340–350.
- Conversation.com. (2020). Growing dependence on China is dangerous for Indonesia – what can be done? Retrieved November 27, 2020). <https://theconversation.com/growing-dependence-on-china-is-dangerous-for-indonesia-what-can-be-done150372>.
- Darmayadi, A., & Purnamasari, E. N. (2022). Indonesia – China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 1, 41–48.
- Departemen Komunikasi. (2024). UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TRIWULAN I 2024 MENURUN. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2610224.aspx
- Desker, B. (2022). Singapore-Indonesia Ties: Renewed Deal for A New Age. *RSIS Commentary*, 007.
- Heny, A., & Nurdin, M. (2022). Menuju pemerintahan terbuka. 1–17.
- Kristiadi, R. (2021). The Effect of the China - United States Trade War on Indonesia's Trade Relations with the United States. *Journal of Politico*, 4.
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Adhayanto, O. (2022). Travel Corridor Arrangement Application

- Process by Governments of Indonesia and Singapore. *Jrnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 2, 263-274.
- Nasir, et, A. (2023). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 9(3), 356–363.
- Nugraha, Ogi Nanda Raka Ade Candra, A. P. W. M., & Erwan Syah, Danang Prasetyo, F. F. W. I. (2022). Diplomatic Bluff against Indonesia's G20 Presidency amid the Ukraine - Russia Conflict: A View from Political Psychology. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(2), 123–141.
- Nurlaili. (2023). pengaruh utang luar negeri terhadap perekonomian indonesia. <https://www.acehtrend.com/news/pengaruh-utang-luar-negeri-terhadap-perekonomian-indonesia/index.html> okezone.com. (2022).
- Rakhmat, M. Z. (2020). Growing dependence on China is dangerous for Indonesia – what can be done?
- Rifki, M. (2021). Implementation Indonesia-Japan bilateral Relations After The Agreement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Setiawan, A. and A. N. Z. (2019). *Diplomasi Maritim Indonesia: Dalam menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019*. Jakarta: UM Press.
- Setiawan, A., Gunanto, D., & Saputra, Y. (2022). Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 2014-2022. *Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 5(2), 119–135.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *Journal of Management*, 3, 327–340.
- Verico, K., & Riefky, T. (2022). Bilateral Trade and Investment Relations Analysis: Indonesia and South Korea. *International Journal of Business and Society*, 2, 714-750.
- Yerichielli, Y. (2019). Indonesia – Amerika dalam Kerangka Comprehensive Partnership. *Global. Political Studies Journal*, 1(3), 90–109.
- Zaskya Humairah. (2023). Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI)*, 3(3), 1338–1356.